**NOTULENSI RAPAT**

**Konsultasi Teknis Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573**

**02 Agustus 2023**

Waktu : 10.00 WITA – selesai

Tempat : Kantor DKP Provinsi D.I. Yogyakarta

Agenda : Konsultasi Teknis Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573

Sehubungan dengan surat undangan dari Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.3467/DJPT.2/TU.330/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Undangan Konsultasi Teknis Kedua Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573, bersama ini kami sampaikan notulensi sebagai berikut:

1. Konsultasi Teknis Kedua Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573 dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2023 di Yogyakarta – Jawa Tengah. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh Koordinator PSDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI Perairan Laut, perwakilan Pemerintah Daerah, perwakilan Pusat Riset Perikanan – BRSDM KP, Pusat Riset Perikanan – BRIN, perwakilan Kelompok Hukum Humas dan Kerjasama, perwakilan Perguruan Tinggi di WPPNRI 673, perwakilan pelaku usaha perikanan kakap dan kerapu, perwakikan RNF, perwakilan YKAN.
2. Tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan Konsultasi Teknis Kedua Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573.
3. Beberapa poin penting dalam rapat ini adalah:
4. Arahan dan Pembukaan Pengelolaan Perikanan Kakap oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
* Kendala yang dihadapi rentang kendali pusat yang terbatas, perairan Indonesia yang begitu luas, negara kepulauan, karakteristik perairan ekosistem yang berbeda-beda, perbedaan kondisi sosek-budaya pemanfaatan di masing-masing wilayah.
* MenKP telah menetapkan 11 RPP berbasis WPP dan 6 RPP berbasis jenis ikan
* Komoditas kakap kerapu 🡪 komoditas ekspor unggulan memiliki nilai ekonomis penting
* Berdasarkan data tahun 2019, kakap kerapu berada pada peringkat ke-6 nilai jual perdagangan dunia, sedangkan pada volume produksi menempati urutan ke-9. Pasar utama di AS, Hongkong, Singapura, dan Tiongkok.
* Perikanan kakap kerapu penting karena 90% dilakukan oleh nelayan skala kecil, sehingga dipengaruhi oleh perilaku dan permintaan konsumen
* Ukuran yang diminta pasar ukuran golden size (300-500 gr) 🡪 berdampak ada penurunan stok ikan
* Kepmen KP No 123 Tahun 2021 tentang RPP kakap kerapu 🡪menunjukkan bahwa kakap kerapu sebagai komoditas perikanan prioritas dalam program pengelolaan perikanan berkelanjutan
* Salah satu rencana aksi RPP adalah Menyusun & mengimplementasikan strategi pemanfaatan
* Harvest strategy ini sebagai bentuk pengendalian pemnafaatan sumber daya kakap kerapu di WPPNRI sehingga penurunan stok ikan dapat diantisipasi
* HS di WPPNRI 713 🡪 dalam proses penetapan, menunggu untuk legalisasi
* Memulihkan stok kakap kerapu di 573 perlu menetapkan HS kakap kerapu di 573
* HS 🡪 mendukung upaya sertifikasi ecolabeling untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk perikanan kakap kerapu di Indonesia, juga berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan
* Konsultasi teknis ke-2 memfokuskan untuk menghimpun masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang terdistribusi di selatan Jawa
* Konsultasi teknis ke-1 menghimpun masukan dari pemangku kepentingan di selatan Bali, NTB, NTT
1. Paparan Urgensi penyusunan HS kakap dan kerapu di WPPNRI 573
* Urgensi 🡪 potensi lestari perikanana karang totalnya mencapai 829.051 ton, 90% dilakukan oleh nelayan skala kecil, pemasok utama kakap kerapu dunia sebesar 45%, komoditas prioritas ecolabelling MSC, adanya permintaan pasar ukuran piring terhadap ukuran laya tangkap (trade limit <50% di bawah Lm), permintaan pasar terhadap ukuran piring 🡪 diidentifikasi tidak layak tangkap karena di bawah ukuran yang tidak disarankan.
* Persentase produksi kakap di WPPNRI 573 3,5% dan kerapu 6,5%
* Isu di masing-masing aspek SDI, Lingkungan SDI, sosek, dan tata Kelola perikanan. Terutama kecenderungan degradasi stok ikan kakap kerapu oleh pemanfaatan berlebih di beberapa WPPNRI.
* Penyusunan HS dilakukan ntuk mengatasi isu SDI terkait degradasi stok ikan kakap-kerapu yang disebabkan oleh pemanfaatan berlebih.
* SDI 🡪 lead untuk kuota 🡪 kuota untuk kakap kerapu akan dikelompokkan tersendiri.
* Dari isu yang ada 🡪 addressing dengan strategi pengelolaan kakap kerapu pada SDI, lingkungan, sosek, dan tata kelola
* Amanat penyusunan HS dalam Kepmen KP No 123 Tahun 2021
* Dokumen HS merupakan komponen penting dari kerangka pengelolaan perikaan yang lebih luas di dalam RPP, pelengkap operasional RPP, basis dari siklus pengelolaan yang adaptif, dan menyediakan pendekatan yang formal & konsisten bagi proses pengambilan keputusan pegelolaan.
* Petunjuk teknis HS 🡪 Peraturan Dirjen PT No. 17 Tahun 2017
* Proses penyusunan sudah dimulai dari tahun 2022 dan saat ini sudah di tahapan konsultasi teknis dengan berbagai pemangku kepentingan
* Unit pengelolaan yang dipilih untuk monitoring merupakan ikan yang dipertimbangkan berdasarkan kriteria adalah hasil tangkapan dominan
1. Penyampaian Dokumen Harvest Strategy Perikanan Kakap dan Kerapu oleh Dr. Irfan Yulianto (RNF)
* Konsultasi yang telah dilaksanakan yaitu konsultasi teknis 1 di Bali untuk menghimpun masukan dari stakeholder di WPPNRI sekitar Bali, NTB, NTT, konsultasi dengan pihak KKP menyampaikan update dan progress, hari ini konsultasi teknis ke 2 saat ini di Yogya menghimpun masukan dari daerah sekitar Jawa
* Tujuan utama 🡪 menyusun HS berdasarkan juknis yang telah ditetapkan Perdirjen PT No 17 Tahun 2017 sebagai panduan dalam penyusunan dengan mengakomodir masukan dari stakeholder di WPPNRI 573
* Status perikanan di WPPNRi 573 untuk ikan demersal hijau dan ikan karang merah. Namun akan dilihat kembali kondisi kakap kerapu yang dilihat proksinya dari beberapa spesies
* Kakap relatif stagnan sedangkan kerapu fluktuatif.
* Gambaran data yang digunakandari 3 lembaga utama fip2b (cover seluruh di NTB), ykan (cover selatan jawa, probolinggo, bali, dan NTT), BRPL (cover NTT dan Jawa barat)
* Area geografis pengelolaan dari 8 provinsi, 56 kab/kota, 1 lpp wpp, 1 pps, 3 ppn, 3 ppi, 51 tpi/pp
* API pancing ulur dan rawai dasar dominan digunakan untuk kerapu di 573 (>80%)
* Spesies dominan kerapu *E. areolatus*, *V. albimarginata*, *C. miniata* tertangkap nelayan yang beroperasi di 573.
* 2 kerapu relative aman yaitu *V. abimarginata* (diatas TRP), *E. areolatus* kondisinya diantara LRP-TRP masih cukup oke apabila menggunakan reference point dari Komnaskajiskan. Sedangkan *C. miniata* terus mengalami penurunan 🡪 indikasi penangkapan semakin meningkat dan kurang sehat
* API pancing ulur, juga ada kontribusi rawai dasar dan jaring insang pada API dominan yang digunakan untuk menangkap kakap di WPPNRI 573 🡪 perlu menetapkan ukuran mata jaring juga.
* Unit perikanan yang dijadikan indicator untuk menentukan kondisi kakap yaitu dari 5 spesies kakap *L. malabaricus*, *P. typus*, *P. multidens*, *P. filamentosus*, *L. gibbus*. 3 spesies diatas TRP, 1 spesies diantara TRP dan LRP, 1 spesies fluktutif diantara LRP dan dibawah LRP
* *P. filamentosus* perlu kehati-hatian dalam handling data dan dilihat lebih jauh
* Untuk kakap trade limitnya cukup jauh dari nilai median. Pada kasus kakap semakin jauh jarak median dengan Lm memperlihatkan kondisi perikanan yang semakin memburuk
* Semua data pada tahun 2021 – 2022 tidak digunakan 🡪 menyepakati data 2021 -2022 dikeluarkan karena hasilnya kurang pas juga hanya disumbangkan dari 1 lembaga saja.
* Analisi MERA 🡪 untuk menghasilkan management procedure dengan 4 pendekatan TAC (total allowable catch), TAE (total allowable effort), size limit, seasonal/spatial closure
1. Paparan rekomendasi pengelolaan perikanan Kakap Kerapu (Analisis MERA) – Dr. Moh. Natsir (BRIN)
* HS 🡪 kerangka kerja yang menjelaskan tindakan pengelolaan yang telah ditentukan pada suatu perikanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan biologi, ekologi, ekonomi, social yang disepakati
* Saat ini sedang drafting untuk HS di WPPNRI 573, sebelumnya HS WPPNRI 713 sudah dilakukan
* Tujuan RAPP kakap & kerapu 🡪 mewujudkan pengelolaan SDI kakap & kerapu secara berkelanjutan 🡪 dengan sasaran tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level fully exploited di beberapa WPPNRI 🡪 melalui rencana aksi 🡪 menyusun & mengimplementasikan strategi permanfaatan perikanan kakap kerapu (didetailkan dalam HS).
* HS tujuan konseptual 🡪 memastikan keberlanjutan SDI kakap kerapu di WPPNRI 573
* HS tujuan operasional 🡪 memulihkan Kesehatan stok ikan yang mengalami indikasi merah dan kuning serta mempertahankan yang berwarna hijau
* LRP 20%, TRP 30%
* 4 menagament procedure dijalankan 🡪 yang diambil yang lingkaran merah agar mengahsilkan biomassa yang membaik, dan yield tetap bagus.
* *L. gibbus* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC dan spatial closure
* *L malabaricus* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC, size limit 48, 50, 54 cm, spatial closure.
* *P. multidens* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC dan SL 48, 46, 50 cm
* *P. typus* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC dan SL 54, 52, 50 cm
* *P. filamentosus* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC dan SL 48, 50, 52 cm
* *E. areolatus* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC, TAE, SL 30 cm, dan spatial closure
* *C. miniata* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC, SL 26 dan 28,6 cm
* *V. albimarginata* 🡪 strategi pengelolaan berdasarkan MERA yaitu TAC dan spatial closure
* Strategi pembangunan Kembali stok serta kaidah pengendalian penangkapan untuk perikanan kakap kerapu di WPPNRI 573 yaitu aturan alokasi kuota penangkapan (TAC), aturan jumlah Upaya penangkapan (TAE), aturan API (mata jarring/mata pancing), aturan ukuran minim ikan yang boleh ditangkap, memberlakukan penutupan area penangkapan pda musim/area tertentu.
* TAC 🡪 sudah mulai diarahkan dari DJPT untuk implementasi PIT
1. **Sesi Diskusi**

Komentar DKP Jateng:

* Sebelumnya sudah pernah dilakukan di Prov. Jateng untuk size limit namun kurang optimal dalam penerapannya, karena dari sisi pengusaha pasti menerima semua ukuran.
* Seasonal closure bisa dilakukan, namun butuh biaya mahal karena perlu mempersiapkan insentif atau alternatif lain untuk mengalihkan pekerjaan nelayan ini terutama nelayan skala kecil Ketika dilakukan penutupan. Karena dengan adanya pembatasan musim/waktu tentu nelayan/pelaku usaha akan merasa dirugikan. Perlu didisukisikan lebih lanjut terkait insentif apabila mau menerapkan seasonal closure.
* TAC sejalan dengan PIT, DKP akan diberikan kuota terhadap nelayan local yang beroperasi di wilayah administrasi, di Pantura terkait PIT masih cukup dinamis dalam penerapannya.

Komentar DKP DIY:

* Setuju dengan komentar yang diberikan oleh DKP Jateng, jangan sampe pengaturan HS ini malah menjadi penghambat sector perikanan

Komentar Maria:

* Penyedartahuan nelayan penting juga dilakukan sebagai kesadaran untuk berkontribusi melindungi ikan, pemerintah punya keterbatasan untuk memantau. Melindungi alam tentunya akan melindungi livelihood nelayan dan pelaku usaha. Oleh sebab itu perlu menyadarkan mereka untuk mengembalikan ikan dibawah ukuran minimal, mengembalikan by catch, mengolah sampah.
* Bisa explore perlu public campaign untuk keseluruhan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Perlu juga didorong edukasi utuk literasi data perikanan termasuk diantaranya para nelayan kecil, agar mereka dapat memahami damapk SPR apabila <20% thd SDI, sehingga diseminasi info data saintifik bisa jadi konsumsi kelompok nelayan, untuk memobilisasi dukungan luas para pemanfaat SDI, termasuk nelayan kecil dalam menjaga kelestarian dan bangun kepatuhan terhadap regulasi

Komentar La Sara:

* Bagaimana mengatasai persolaan yang berkaitan dnegan kepentingan nelayan sendiri, dalam hal ini indikator yang disebut pak Nasir terkait seasonal closure. Tentunya nelayan skala kecil, ketika dibatasi waktu dan tempat penangkapan akan timbul persoalan, bagaimana mengahadapi persoalan tersebut? Kondisi seperti itu perlu diperhatikan karena sulit untuk membatasi ketika nelayan ingin melakukan penangkapan.
* Saya ingin menawarkan bagiamana tindakan alternatif manajemen kakap kerapu, karena sebelumnya belum disinggung sekali – mungkin bisa menawarkan tindakan alternatif lain ke nelayan, misal budidaya. Untuk bisa memenuhi maka pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat menyediakan aternatif tersebut. Sebelumnya sudah ada inisiasi membangun nelayan maju dengan dilakukan pengembangan budidaya, mungkin hal itu juga bisa dilakukan.

Tanggapan Yudi Herdiana:

* Sedikit tambahan dan sebagai bahan, mengatur nelayan skala kecil masih cukup sulit untuk dikelola. Perlu berpikir solusi kedepannya untuk mengkomunikasikan hal ini ke masyarakat. Membangun pemahaman dengan masyarakat terkait kondisi perikanan, sehingga muncul kesadaran dari nelayan tersebut untuk timbul rasa pentingnya pengelolaan SDI.

Tanggapan Rizal

* Untuk HS rajungan, belum termasuk HCR di dalam dokumennya sehingga saat ini dalam pengembangan untuk memasukkan HCR dan memasukkan aspek social-ekonomi untuk rajungan. Size limit banyak tantangan yang harus dihadapi, setiap Langkah pengelolaan yang dilakukan berujung pada memfokuskan penangkapan dnegan memperhatikan keberlanjutan SDI. Pasar juga punya pengaruh terhadap hal ini, oleh sebab itu kita perlu menydartahukan pemahaman terkait esensi dari petningnya keberlanjutan stok ikan 🡪 apabila kondisi ikan tersebut sudah drop. Konsultasi publik, winwin solutionnya seperti apa untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan opsi-opsi pengelolaan yang memiliki opsi penolakan paling minim. Terkiat sptial closure, konsultasi public di makassar 🡪 sedikit ada penolakan. Perlu konsultasi dan pendekatan dengan nelayan. Terkait TAC dari DJPT intens karen merupakan turuna dari PIT.

Tanggapan Natsir

* Perlu mengakomodir masukan agar tetap adaptif dalam pengelolaan perikanan, sehingga dapat menghasilkan oengelolaan yang lebih baik. Sehingga masukan-masukan dari berbagi stakeholder dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk diimplementasikan.

Komentar BKIPM

* Tusi BKIPM terkait sertifikasi ekspor dan domestik. Kalo size tergantung permintaan buyer., sehingga perlu mengakomodir masukan dari teman-teman pelaku usaha. Edukasi perlu sampe ke level kebawah (nelayan, pelaku usaha) terkait misal akan diimplementasikan terkait minum size. Jika nantinya ada hal yang menyebabkan menurunnya angka ekspor, mungkin kami bisa mencari penyebabnya.

Tanggapan Natsir

* Perlu update data ekspor kakap kerapu, tren size limit yang diekspor, tren limit dari masing2 negara tujuan ekspor apakah meminta ukuran tertentu. Mungkin dari teman2 bkipm dan PT bisa mengupdate agar informasinya lebih lengkap. Ukuran perdagangan maupun ukuran yang menjadi permintaan pasar bisa disumbangkan untuk data HS nantinya.

Tanggapan Rizal

* Apakah bisa memperoleh informasi tambahan yakni terkait data ekspor bisakah ditambahkan untuk data lebih spesifik diketahui dari laut mana? 712 atau 573? Adakah informasi ikan yang diekspor tersebut dari perairan mananya?

Tanggapan BKIPM

* Terkait identifikasi ikna berasal dari perairan mana, kami tidak menuntut supplier untuk memberikan informasi dari perairan mana sehingga kalo terkait data tersebut mungkin tidak menyediakan data informasi tersebut.

Komentar DKP Jateng

* Pertama, Kami berharap membuka partisipasi luas tidak hanya pelaku usaha, karena dampaknya cukup luas yang akan berdampak pada nelayan skala kecil, maka perlu membuka ruang yang lepas untuk menampung informasi dari mereka juga. Agar kebijakan yang ditetapkan nantinya minim penolakan.
* Kedua, terkait data di Jateng masih data dari sumber data yang berbeda. Harapannya semua data yang diambil dari satudata satu dashboard semua stakeholder, jangan berbeda-beda.
* Ketiga, isu API di pantura yaitu arad tumbuh makin subur dampaknya kakap kerapu semua ukuran menjadi by catch dari API Tersebut. API pasif menangkap kakap kerapu dominan yaitu bubu malah tergeser, sedangkan kita tau kalo arad merupakah API aktif. Karena saat itu sudah ada kelonggaran terkait penggunaan arad dan muncul kekhawatiran nelayan bubu ini akan menggunakan arad juga. Sehingga ini menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Tanggapan Natsir

* Terkait data masih menjadi pr bersama, untuk pendugaan stok kita pake best available data dan informasi. Di HS ini akan sedikit disebut untuk mengingatkan bahwa kontinuitas pendataan menjadi concern utama dalam monev dan pendugaan stok, sehingga perlu data yang dikumpulkan secara periodik dan data yang bagus.
* Terkait arad, cantrang sudah diizinkan secara terbatas pada permenkp revisi. Namanya disesuaikan menjadi jaring Tarik berkantong. Alat ini mungkin bisa sustainable, namun perlu pengaturan yang sangat ketat agar dampaknya terhadap lingkungan bisa diminimalisir.

Tanggapan Rizal

* Partisipasi kita selalu mengajak semua stakeholder, walaupun prosesnya menjadi agak lama karena akan menghimpun masukan dari semua stakeholder lalu menyesuaikan dengan opsi-opsi yang kiranya bisa dilakukan. Tindakan pengelolaan yang dipilih nantinya yang minim penolakan.
* One data gabisa menganalisis kajian lebih dalam seperti biologi. Sehingga tetap perlu data sampling yang dikumpulkan melalui enumerator untuk memperoleh informasi tersebut terkait kebutuhan pengelolaan perikanan.
* Terkait arad dari segi pemerintah kalo untuk API perlunya pengaturan, jika nantinya menimbulkan keresahan maka perlu diperketat lagi terkait aturannya.

**Follow Up**

* Setelah konsultasi tim penyusun dan SDI akan drafting dan mulai merumuskan strategi pengelolaan.
* PSDI akan memfasilitasi pertemuan dengan industry dalam perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 573 untuk melihat respon dari strategi pengelolaan perikanan yang di usulkan terutama terkait dengan “trade limit”
* Dokumen HS akan diserahkan ke SDI untuk tindaklanjuti, perlu teknikal konsultasi lagi, nanti outputnya berupa rancangan HS. Dari KKP akan mengolah dan menindaklanjuti dokumen tersebut dengan diadakan pertemuan kembali.